



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 162/SEK/PL1.2/VI/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Verifikasi Data Indikatif Persertipikatan
Tanah TA 2025 di Lingkungan Mahkamah
Agung RI

Jakarta, 21 Juni 2024

Kepada
Yth. Pimpinan Satuan Kerja (*Daftar Terlampir*)
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-57/KN/KN.2/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Permintaan Data Indikatif Persertipikatan BMN Berupa Tanah TA 2025, Mahkamah Agung RI diminta untuk melakukan identifikasi status persertipikatan tanah seluruh satuan kerja di bawahnya. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya pengamanan aset negara melalui program persertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan maksud agar dapat dipertanggungjawabkan dari aspek legalitas dan akuntabilitas, serta tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi pada aplikasi Monitoring Sertipikat Tanah (Monserah) per 20 Juni 2024, terdapat 123 (seratus dua puluh empat) bidang tanah yang belum bersertipikat pada 82 (delapan puluh satu) satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | Tanah masih dalam progres sertipikasi Tahun 2024 | Tahapan Progres Sertipikasi Tanah Tahun 2024 | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | Tahap persiapan (P0) | Tahapan pengajuan berkas (P1) | Tahapan berkas yang dikembalikan (P2) | Tahapan Pengukuran (P3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nominatif 2024 | 69 | 26 | 24 | 2 | 16 |
| Belum Masuk Nominatif | 54 | 50 | 3 | - | 3 |
| Total | 123 | 76 | 27 | 2 | 19 |

Detail: <https://bit.ly/MonitoringSertipikasiTanah2024>

Dari data di atas diperintahkan agar:

1. Satuan kerja yang sudah terdaftar dalam nominatif tahun 2024 dan belum mengajukan pensertipikatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk menyelesaikan proses percepatan sertipikasi sesuai ketentuan yang berlaku. **(Lampiran II)**
2. Satuan kerja yang belum masuk nominatif tahun 2024 namun tanahnya belum berstatus *Clean and Clear* agar melakukan verifikasi dan konfirmasi pada *link* berikut ini <https://bit.ly/VerifikasiTanahTahun2024> **paling lambat 25 Juni 2024** serta wajib melaporkannya pada Pembina masing-masing wilayah. **(Lampiran III)**
3. Satuan kerja yang belum masuk nominatif tahun 2024 namun tanahnya sudah berstatus *Clean and Clear* agar segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat dan mengajukan usulan untuk masuk nominatif tahun 2024 sehingga proses sertipikasi bisa dilakukan di tahun 2024. **(Lampiran IV)**
4. Satuan kerja yang masih memiliki kategori tanah "Bersertipikat Sebagian Bidang" agar segera melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah bidang tanah, jumlah bidang tanah bersertipikat, luas tanah pada aplikasi SIMAN dan luas tanah pada aplikasi SAKTI pada *link* berikut ini <https://bit.ly/VerifikasiTanahTahun2024>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
6. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (<https://bsre.bssn.go.id/repository>).

Lampiran I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor :162/SEK/PL1.2/VI/2024

Tanggal : 21 Juni 2024

DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA

- 1 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
- 2 PIL. KEPALA BIRO UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI
- 3 KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
- 4 KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
- 5 KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- 6 KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
- 7 KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA
- 8 KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
- 9 KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
- 10 KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
- 11 KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
- 12 KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
- 13 KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
- 14 KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
- 15 KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
- 16 KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
- 17 KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
- 18 KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
- 19 KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON
- 20 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
- 21 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
- 22 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
- 23 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
- 24 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
- 25 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
- 26 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
- 27 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG
- 28 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- 29 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
- 30 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
- 31 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- 32 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
- 33 KETUA MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH
- 34 KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
- 35 KETUA PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
- 36 KETUA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
- 37 KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI
- 38 KETUA PENGADILAN NEGERI TIMIKA
- 39 KETUA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
- 40 KETUA PENGADILAN NEGERI TERNATE
- 41 KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
- 42 KETUA PENGADILAN NEGERI TEBO
- 43 KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
- 44 KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
- 45 KETUA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
- 46 KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN
- 47 KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
- 48 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
- 49 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
- 50 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG
- 51 KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- 52 KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA